

# INDUSTRI TPT INDONESIA DALAM ACFTA: Siapa Juragan di Pasar Domestik?

Oleh: Agus R. Rahman

## Abstract

*ACFTA was in force since January 2010 in six ASEAN countries, and other four ASEAN countries in 2015. Implementation of the free trade area between China and ASEAN countries is possible and becomes political and economic reality. It is historical achievement in their relations in which prior to their relations are colored by tremendous crisis. As free trade regions, ACFTA banding almost 1.9 billion peoples represented as the biggest free trade area in the world. From the beginning, ACFTA is further revitalization of AFTA that ASEAN countries prefer to be integrated by external actor, in which China is more acceptable than Japan or South Korea. ACFTA will show opportunities and problems for all economic actors around the region, especially for Indonesia textile and textile product. This makes Indonesian market as second market after China's market. Indonesia still does not give the high priority in export yet toward ACFTA, but its percentage consistently tended to increased. For import, Indonesia also increased this from ACFTA countries. Based on this national grasp, Indonesian textiles and textile products industry are facing difficult periods, especially expansion of China textile and textile product into Indonesian domestic market. Fortunately Indonesian textile and textile products have received the world heritage in which this emerged as new energy for revitalization of Indonesia textile and textile products in strengthening their competitive advantage and market shares in both domestic and international market. Now and then Batik starts to be the most outstanding Indonesian icon.*

## Pengantar

Sejak 1 Januari 2010, *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) sebagai suatu kawasan perdagangan bebas untuk barang mulai diberlakukan antara China dengan enam negara anggota *Association of South East Asian Nations* (ASEAN), yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Akan tetapi, empat negara anggota ASEAN lainnya seperti Laos, Kamboja, Myanmar dan Vietnam baru akan memberlakukannya pada tahun 2015. Artinya, ACFTA itu bukan lagi sekadar konsep, tetapi ia menjelma sebagai sebuah realitas politik dan ekonomi. Secara politik, ACFTA merupakan puncak keputusan strategis yang berani di tengah masih kuatnya arus regionalisasi yang mencontoh model Uni Eropa (UE)<sup>1</sup> dan semakin mengototnya gelombang globalisasi.<sup>2</sup> Secara ekonomis, kekuatan-kekuatan ekonomi yang

membentuk pasar regional ternyata bersenyawa dengan kekuatan-kekuatan ekonomi global yang mengagendakan mekanisme perdagangan bebas sebagai perdagangan yang adil.<sup>3</sup> Walaupun hal ini harus diakui bahwa globalisasi dapat saja gagal untuk mercalisasikan janji-janjinya yang semakin menjauh dari perdagangan yang adil.<sup>4</sup>

Sejak itu pula, keenam negara anggota ASEAN, atau ASEAN-6, bersama-sama China secara kolektif meletakkan tonggak sejarah bagi pola hubungan mereka. Hubungan mereka yang semula dipenuhi oleh kecurigaan tanpa hubungan diplomatik, kemudian berubah menjadi hubungan yang bersahabat dalam hubungan diplomatik yang semakin berarti. Memang, normalisasi hubungan diplomatik antara China dengan Filipina, Malaysia, dan Thailand dilakukan lebih dahulu dibandingkan dengan hubungan diplomatik antara China dengan Brunei Darussalam.

<sup>1</sup> Lihat Caroline L. Freund, "Regionalism and Permanent Diversion", *International Finance Discussion Papers*, No. 602 (Washington, DC: Board of Governors of the Federal Reserve System, Januari 1998).

<sup>2</sup> Lihat Jagdish Bhagwati, *In Defense of Globalization*, (Oxford: Oxford University Press, 2004).

<sup>3</sup> Lihat Johan Norberg, *Membela Kapitalisme Global* (Jakarta: Freedom Institute, 2008); dan Joseph E. Stiglitz, *Making Globalization Work*, (London: Penguin Book, 2006).

<sup>4</sup> Lihat Joseph E. Stiglitz, *Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional*, (Jakarta: Ina Publikatama, 2003).

Indonesia, dan Singapura yang baru dilakukan pada dasawarsa 1990-an.<sup>5</sup>

Sebagai suatu kawasan perdagangan bebas, ACFTA membentuk zona yang memiliki hampir 1,926 miliar konsumen, dibandingkan dengan kawasan Asia Timur yang hanya 1,523 miliar konsumen sebagaimana terlihat pada Tabel 1, dengan pendapatan nasional per kapita yang sangat variatif di antara anggotanya. Pada satu sisi, Singapura merupakan negara anggota ASEAN dengan nilai GDP yang tertinggi, yang kemudian disusul oleh Brunei Darussalam. Sementara itu, Laos, Kamboja, dan Myanmar merupakan negara-negara dengan nilai GDP terendah yang kurang dari seribu dolar AS. Sebaliknya, China, Filipina, Indonesia, Malaysia, dan Thailand merupakan negara-negara dengan nilai GDP yang mencapai besaran di atas seribu dolar AS. Dengan jumlah konsumen sebesar itu, zona ACFTA adalah *Free Trade Area* (FTA) terbesar di dunia berdasarkan ukuran besaran penduduk yang mencapai 1.926.108.335 jiwa, yang melampaui *North American Free Trade Area* (NAFTA) dan EU, baik secara sendiri-sendiri maupun NAFTA dan EU digabung.<sup>6</sup> Selain itu, ACFTA pun juga merupakan FTA terbesar yang mampu dibentuk oleh negara-negara berkembang atas dasar *Gross Domestic Product* (GDP) dan perdagangannya, setelah China bergabung dalam *World Trade Organization* (WTO). Dengan demikian, ACFTA menjadi bersifat ambisius karena FTA ini tidak hanya mengamankan liberalisasi perdagangan barang dan jasa, melainkan juga mendorong investasi dan kerja sama ekonomi yang lebih maju, yang bukan hanya sekadar kawasan perdagangan bebas, melainkan juga mulai mengarah kepada integrasi ekonomi.

<sup>5</sup> Hubungan diplomatik keenam negara anggota ASEAN dengan China tidak bersamaan, ketika tiga negara anggota ASEAN melakukannya pada tahun 1974, oleh Malaysia pada bulan Mei 1974, dan kemudian disusul oleh Filipina pada bulan Juni 1975, dan Thailand pada bulan Juli 1975, sedangkan tiga negara anggota ASEAN lainnya melakukannya setelah tahun 1990-an, seperti Indonesia pada Juli 1990 dan Singapura pada bulan Oktober 1990, kemudian dilengkapi oleh Brunei Darussalam pada bulan September 1991.

<sup>6</sup> Berdasarkan data prakiraan Population Division of the United Nations Department of Economic and Social Affairs, per 1 Juli 2009, jumlah penduduk NAFTA mencapai 451.399.697 jiwa, dan penduduk UE yang beranggotakan 27 negara berjumlah 957.918.105 jiwa.

ACFTA di mata pemimpin politik Indonesia adalah suatu sukses diplomasi terbesar pada dasawarsa 1990-an, tetapi ACFTA di mata para pelaku ekonomi produsen di Indonesia menjadi sebuah ancaman/tantangan dan sekaligus peluang yang akan menentukan arah dinamika perekonomian Indonesia. Artinya, ACFTA-pun menjadi sebuah ancaman/tantangan dan sekaligus peluang bagi perindustrian Indonesia, khususnya industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sebagai satu sektor yang dimasukkan dalam kerangka ACFTA.

Secara lebih khusus, ancaman/tantangan ini diarahkan terhadap China yang diwujudkan terutama dalam hal persaingan harga di pasar domestik sebagai akibat dari membanjirnya produk-produk TPT China. Berdasarkan pantauan Kementerian Perdagangan terhadap impor lima produk tertentu, seperti alas kaki, elektronik, mainan anak-anak, makanan dan minuman serta TPT, impor dari China memperlihatkan kecenderungan yang positif secara bertahap sehingga mampu mencapai posisi dominan. Impor TPT China menempati urutan kedua terbesar yang mencapai nilai 100 juta dolar Amerika Serikat (AS), setelah elektronik China yang mencapai 2,4 miliar dolar AS. Impor TPT China bernilai 42% dan sisanya dikuasai oleh Spanyol dan Inggris.<sup>7</sup> Memang, sebagai bagian dari perjanjian ACFTA, negara-negara anggota ACFTA bersepakat untuk menghapus bea masuk hingga nol persen. Sebaliknya, suatu fokus menjadi cukup relevan untuk mempertimbangkan bagaimana industri TPT Indonesia memanfaatkan peluang yang tersedia di China atau negara-negara anggota ASEAN lainnya.

Sebagai suatu ancaman/tantangan, ancaman mulai dirasakan menyesakkan sejumlah pabrik TPT di Indonesia. Walaupun merujuk kepada pelaku pedagang tingkat grosir, tetapi hal ini sungguh menjadi pertanda yang perlu mendapat perhatian serius para pelaku ekonomi produsen. Para pelaku tingkat grosir TPT di Jawa Barat mengurangi pesanan mereka sebesar 40% ke pabrik sejak awal Desember 2009. Para pelaku grosir ini berharap untuk mendapatkan TPT asing dengan harga yang lebih murah pada awal

<sup>7</sup> Lihat "Produk China Dominasi Impor RI," <http://bataviase.co.id/node/127579>; diunduh pada 16 Juni 2010.

tahun 2010.<sup>8</sup> Apakah ancaman/tantangan ini akan menghancurkan kinerja industri TPT Indonesia? Seberapa besar ACFTA sebagai ancaman atau peluang bagi industri TPT Indonesia?

### Dari AFTA Menjadi ACFTA

Sejak tahun 1992, negara-negara anggota ASEAN sepakat untuk membentuk ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) secara bertahap hingga realisasinya secara penuh pada 2010. Pada tahun 2010, enam negara pendiri ASEAN menghapus seluruh tarif impornya, sedangkan negara anggota ASEAN lainnya diberlakukan pada 2015. Untuk mencapai tujuan ini, negara-negara anggota ASEAN itu memberlakukan kebijakan yang signifikan dalam menurunkan tarif intra-regional melalui mekanisme *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) atas barang-barang yang diperdagangkan di jajaran negara anggotanya. Mekanisme ini mencapai sekitar 40% persyaratan kandungan ASEAN. Pembentukan AFTA melalui CEPT dinilai suatu langkah yang berani, setelah kekecewaan terhadap *Preferential Trading Arrangement* (PTA) di lingkungan ASEAN.

Ketika PTA ASEAN diluncurkan pada tahun 1977 dengan pendekatan *product-by-product*, negara-negara anggota ASEAN secara bersama-sama bertujuan untuk merealisasikan liberalisasi perdagangan sesama negara anggota ASEAN. Dalam konteks ini, margin preferensinya hanya mencapai 10%, yang dinegosiasikan secara sukarela. Preferensi ini mensyaratkan kandungan lokalnya sebesar 50%. Akan tetapi, negara-negara anggota ASEAN ketika itu sama-sama memperkenalkan daftar produk sensitif yang mencakup sebagian besar produk perdagangan intra-ASEAN untuk melindungi industri dalam negeri tertentu. Tampaknya, hal ini memperlihatkan kondisi bahwa negara-negara anggota ASEAN saat itu tidak sungguh-sungguh untuk mempercepat ASEAN sebagai kawasan perdagangan bebas. Ketidaksungguhan mereka dikarenakan perekonomian sesama negara anggota ASEAN tidak bersifat komplementer, disamping setiap pemerintahan harus melindungi

<sup>8</sup> [http://www.indotextiles.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=1095&Itemid=72](http://www.indotextiles.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1095&Itemid=72); diunduh pada 9 Februari 2010.

pasar domestik mereka.<sup>9</sup> Pada tahun 1988, dua dasawarsa sejak ASEAN dibentuk dan/atau satu dasawarsa pelaksanaan PTA, 52% perdagangan intra-regional ASEAN merupakan perdagangan bilateral Malaysia-Singapura, sedangkan perdagangan Singapura dengan Thailand dan Indonesia hanya mencapai 31%. Kondisi ini membuktikan bahwa perdagangan intra-regional ASEAN yang didasarkan pada PTA hanya berpusar pada Singapura.<sup>10</sup>

Walaupun kemudian, margin preferensi dinaikkan hingga 40% serta kandungan lokalnya diturunkan hingga 35%, PTA tetap saja mandul untuk menciptakan liberalisasi perdagangan intra-regional ASEAN. Sementara itu, daftar produk sensitif justru diperluas cakupan produknya. Hal ini menunjukkan bahwa PTA dimotivasi oleh suatu strategi substitusi impor daripada perdagangan yang terbuka dan tujuan-tujuan investasi. Akibatnya, kegagalannya PTA cenderung bersifat politik yang berkenaan dengan masih kuatnya aspek nasionalisme dalam pengelolaan perekonomian nasional masing-masing negara anggota.<sup>11</sup>

Kegagalan penerapan PTA di lingkungan ASEAN membuktikan kegagalan Deklarasi Bangkok tahun 1975 yang diformat sebagai PTA Asia yang pertama di antara negara-negara berkembang.<sup>12</sup> Akan tetapi, kegagalan ini tidak mampu membendung ambisi negara-negara anggota ASEAN untuk tetap memperlihatkan komitmennya menuju integrasi kawasan yang lebih maju. Hal ini dibuktikan dengan pemberlakuan mekanisme baru dengan sebutan

<sup>9</sup> Suthiphand Chirathivat, "ASEAN Economic Integration with the World through AFTA", dalam Joseph L.H. Tan, Ed., *AFTA in the Changing International Economy*, (Singapura: ISEAS, 2000), hlm. 23–24.

<sup>10</sup> Alfredo C. Robles, "The ASEAN Free Trade Area and the Construction of a Southeast Asian Economic Community in East Asia", *Asian Journal of Political Science*, Vol. 12/2 (Desember, 2004), hlm. 91.

<sup>11</sup> Lay Hong Tan dan Samtani Anil, "The Sifting Paradigm in Regional Economic Integration: the ASEAN Perspective", 22 Agustus 2002, hlm. 3, diunduh dari *Social Science Research Network* (SSRN) pada 10 Juli 2010, dengan file doi:10.2139/atau SSRN-id325484, atau lihat juga <http://ssrn.com/abstract=325484>.

<sup>12</sup> Lihat Sayantan Gupta, "The Bangkok Agreement: Prospects for Trade Expansion in the Asia-Pacific Region", 25 Agustus 2009, hlm. 1–14, diunduh dari *Social Science Research Network* (SSRN) 10 Juli 2010; lihat <http://ssrn.com/abstract=1461374>.

**Tabel 1.** Penduduk ASEAN-10 dan ACFTA Kawasan Asia Timur Tahun 2009

No.	Negara	Penduduk		Pendapatan Nasional Per Kapita	
		Urutan	Jumlah	Urutan	Nilai (US\$)
1.	Indonesia	4	234.181.400	144	2.230
2.	Filipina	12	92.226.600	153	1.790
3.	Vietnam	13	85.789.573	172	1.010
4.	Thailand	21	63.525.062	121	3.760
5.	Myanmar	24	50.020.000	-	Kurang dari 995
6.	Malaysia	43	28.306.700	89	7.230
7.	Kamboja	66	14.805.000	185	650
8.	Laos	104	6.320.000	177	880
9.	Singapura	115	4.987.600	33	37.220
10.	Brunei Darussalam	172	400.000	-	Lebih dari 12.196
	ASEAN-10		580.561.935		
11.	China	1	1.338.520.000	124	3.620
12.	Hong Kong	98	7.026.400	40	31.420
	ACFTA		1.926.108.335		
1.	China	1	1.338.520.000	124	3.620
2.	Hong Kong	98	7.026.400	40	31.420
3.	Jepang	10	127.360.000	32	37.870
4.	Korea Selatan	25	49.773.145	54	19.830
	Asia Timur*		1.522.679.545		

\*Kawasan Asia Timur tanpa Taiwan dan Korea Utara.

Sumber: Untuk jumlah penduduk, datanya diambil dari United Nations Department of Economic and Social Affairs, 2009; dan untuk pendapatan nasional per kapita diambil dari World Bank, World Development Indicators Database, Juli 2010.

CEPT. Sayangnya, dengan mekanisme CEPT ini pun masih memberikan konsekuensi yang kecil terhadap perdagangan intra-regional. Dengan demikian, CEPT-pun masih mengandung permasalahan yang krusial bagi percepatan perdagangan intra-regional.<sup>13</sup>

Belajar dari pengalaman kegagalan penerapan PTA dan kurangnya percepatan CEPT di lingkungan ASEAN tersebut, negara-negara ASEAN kemudian mengubah sikapnya yang semula menolak pembentukan pasaran bersama regional atau kawasan perdagangan bebas, seraya menegaskan kembali peranan ASEAN sebagai fasilitator koordinasi kebijakan dan kerja sama ekonomi. Perubahan sikap ini lebih bersifat eksternal daripada internal sehingga pada negara-negara anggota ASEAN sepakat merumuskan Deklarasi Singapura tahun 1992 yang membentuk AFTA.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Lihat Miriam Manchin dan Annette O. Pelkmans-Balaoing, "Clothes without an Emperor: Analysis of the Preferential Tariffs in ASEAN", *Development Studies Working Papers Centro Studi Luca d'Agliano*, No. 223 (Januari 2007).

<sup>14</sup> Lay Hong Tan, dan Samtani Anil, *Op.Cit.*, hlm. 4.

Disayangkan pada awalnya AFTA tidaklah sejalan dengan GATT. Akan tetapi, AFTA yang kemudian dilengkapi dengan perangkat lainnya sehingga menjadi konsisten dengan aturan GATT tentang upaya-upaya pembentukan kawasan perdagangan bebas di antara negara-negara berkembang.<sup>15</sup> Belum lagi AFTA tercapai secara utuh untuk seluruh anggota negara ASEAN, AFTA memasukkan China sehingga menjadi ACFTA.

Pada bulan November 2002, negara-negara anggota *Association of South East Asian Nations* (ASEAN) dan China menandatangani suatu perjanjian *Framework Agreement on ASEAN-China Comprehensive Cooperation* yang disingkat sebagai *Framework Agreement*, yang dikenal kemudian sebagai ACFTA. Berdasarkan perjanjian ini, para pihak tersebut sepakat untuk membentuk FTA pada tahun 2010 untuk negara-negara ASEAN-6<sup>16</sup> dan tahun 2015

<sup>15</sup> Alberta Fabbriotti, "The ASEAN Free Trade Area (AFTA) and Its Compatibility with GATT/WTO", *Asian Yearbook of International Law*, Vol. 8 (2003), hlm. 37-58.

<sup>16</sup> Negara-negara ASEAN-6 adalah lima negara pendiri ASEAN,

untuk empat negara anggota ASEAN lainnya.<sup>17</sup> Sejak awal, ACFTA membedakan antara negara-negara anggota ASEAN sendiri, yaitu antara ASEAN-6 yang lima di antaranya diasumsikan sebagai negara pendiri dengan ASEAN-4 yang merupakan negara-negara anggota baru.

Sejak kesepakatan ini digulirkan, para pihak berusaha untuk menindaklanjuti agar momennya tetap terjaga sesuai dengan arah dan komitmen bersama yang diwujudkan dalam bentuk beberapa kesepakatan lainnya. Suatu perjanjian yang mencakup liberalisasi perdagangan untuk barang berlaku mulai 20 Juli 2005, disamping suatu perjanjian yang meliputi liberalisasi perdagangan untuk jasa berlaku sejak Juli 2007.

Yang menarik adalah mengapa China dan bukannya Jepang atau Korea Selatan yang bersedia bergabung dalam AFTA untuk menjadi ACFTA, daripada negara ini membentuk pengelompokan serupa dengan dua negara lainnya di kawasan Asia Timur. Alasan *pertama* adalah alasan demografis. Konsumen AFTA memang lebih besar dibandingkan dengan konsumen Jepang dan Korea Selatan. Penduduk ASEAN-10 mencapai 581 juta jiwa merupakan pasar yang sangat potensial dibandingkan dengan pasar Jepang dan Korea Selatan yang penduduk kedua negara ini hanya mencapai 177 juta jiwa.

Walaupun begitu, sebagai alasan *kedua*, China melihat bahwa konsumen di negara-negara ASEAN ini menunjukkan preferensi yang lebih terhadap produk dengan harga yang murah, dan tidak menuntut standar produk dan kualitas teknik yang tinggi. Selain itu, China, Jepang, dan Korea Selatan tampaknya saling bersaing di pasar internasional untuk mencari pasar-pasar baru. Bahkan, pengaruh China di kawasan Asia Tenggara ini lebih dominan daripada Jepang dan Korea Selatan.

Alasan *ketiga* merujuk kepada pengaruh China atau faktor China di negara-negara anggota ASEAN. Bahwasanya pengaruh China itu lebih dominan dibandingkan dengan Korea Selatan dan Jepang. Jepang memang dominan di

---

yaitu Filipina, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand, ditambah dengan Brunei Darussalam yang bergabung pada tahun 1990.

<sup>17</sup> Keempat negara anggota ASEAN lainnya adalah Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam.

negara-negara ASEAN berkat investasi asingnya di kawasan yang sedang tumbuh. Jadi, pada tahun 2010, ASEAN secara sekaligus menuntaskan AFTA dan ACFTA yang memperlihatkan fakta bahwa negara-negara di lingkungan ASEAN cenderung berintegrasi berkat tekanan atau godaan dari aktor eksternalnya. Hal ini adalah yang kedua kalinya, setelah diintegrasikan dalam mekanisme investasi asing oleh Jepang selama tiga dasawarsa sebelumnya.

Alasan *keempat* adalah China mengandalkan ASEAN, baik bagi pasokan energi dan bahan baku untuk industrinya maupun pasar ekspor bagi produk pertanian dan industrinya. Memang, China sangat getol untuk mencari mitra kerja sama bidang energi di kawasan ASEAN, disamping upaya-upaya untuk mengembangkan perdagangan yang dikaitkan dengan investasi di luar negeri.<sup>18</sup>

### Posisi Indonesia dalam ACFTA

Kawasan ACFTA merupakan kawasan konsumen terbesar di dunia yang hampir mencapai 1,95 miliar jiwa, dengan kekuatan pendapatan per kapitanya yang sangat bervariasi. Selain itu, perekonomian di kawasan ini pun mengandung suatu pertanda ganda dalam pengertian bahwa sebagian negara menerapkan sistem perekonomian terbuka dengan mekanisme pasar sebagai tonggakannya, dan sebagian lagi dengan sedikit warna sosialismenya masing-masing negara.

Sebagaimana terlihat pada tabel 1, pasar terbesar dalam kawasan ACFTA adalah China dengan 69,59% dari keseluruhan kawasan ACFTA, yang kemudian disusul Indonesia sebagai posisi kedua dengan 12,16% dari total kawasan ACFTA. Selain itu, konsumen Indonesia merupakan konsumen menengah karena memiliki pendapatan per kapita sekitar 2.230 dolar AS setahunnya, yang juga masih di bawah pendapatan per kapita konsumen China yang mencapai 3.620 dolar AS setahunnya. Pendapatan per kapita konsumen Indonesia sebesar ini masih di bawah pendapatan per kapita konsumen Malaysia yang

---

<sup>18</sup> Lihat Yasmin Sungkar, "ASEAN-China FTA: Komitmen dan Implikasi Ekonominya", dalam Ratna S. Inayati (Ed.), *ASEAN-China FTA: Akselerasi Menuju East Asia Community (EAC)?* (Jakarta: LIPI Press, 2006).

**Tabel 2.** Perbandingan antara Nilai Total Ekspor/Impor Indonesia dengan Nilai Ekspor/Impor Indonesia ke/dari Pra-ACFTA/ACFTA (dalam % terhadap Total Ekspor/Impor) Tahun 2003–2010 (dalam Juta Dolar AS)

No.	Tahun	Nilai Total Ekspor	Nilai Total Impor	Nilai Ekspor ke ACFTA (%)	Impor dari ACFTA (%)
1.	2003	61.058,3	32.550,7	14.528,0 (23,79%)	10.687,4 (32,83%)
2.	2004	71.584,6	46.524,5	17.602,2 (24,59%)	15.595,7 (33,52%)
3.	2005	85.660,0	57.700,7	22.487,3 (26,25%)	22.882,8 (39,66%)
4.	2006	100.798,6	61.065,5	26.826,7 (26,61%)	25.607,5 (41,93%)
5.	2007	114.100,9	74.473,4	31.967,6 (28,02%)	32.350,1 (43,44%)
6.	2008	137.020,4	129.197,3	38.807,3 (28,32%)	56.215,0 (43,51%)
7.	2009	116.510,0	96.829,2	36.123,3 (31,00%)	41.724,2 (43,09%)
8.	2010*	47.572,0	41.197,0	15.358,1 (32,28%)	18.611,2 (45,18%)

\*Januari–April 2010

Sumber: Data diolah dari Badan Pusat Statistik, Indikator Ekonomi Mei 2010 (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2010).

mencapai 7.230 dolar AS dan Thailand dengan pendapatan per kapita sebesar 3.760 dolar AS.

Walaupun jumlah penduduk China merupakan pasar terbesar dalam ACFTA, China tampaknya tidak merasa takut akan impor dari negara-negara ASEAN karena mereka yang akan memasuki pasar China harus berhadapan dengan produk China yang berharga murah. Bahkan, China dapat memanfaatkan pasar ACFTA kesepuluh negara-negara anggota ASEAN sebagai pasar baru produk China.

Dalam hal ini, Indonesia justru memperlihatkan perkembangan yang menarik perhatian dalam memanfaatkan pasar ACFTA, sebagaimana perkembangannya tergambar pada Tabel 2. *Pertama*, total ekspor dan impor Indonesia selama kurun waktu 2003–2008 mengalami peningkatan, kecuali tahun 2009 yang mengalami penurunan. Dalam kondisi ini, Indonesia mengalami surplus dalam perdagangan internasionalnya selama kurun waktu 2003–2009, termasuk periode Januari–April 2010. *Kedua*, perkembangan ekspor dan impor Indonesia ke kawasan pra-ACFTA selama kurun waktu 2003–2009, memperlihatkan kecenderungan yang sama dengan perkembangan total ekspor dan impor Indonesia. *Ketiga*, persentase nilai ekspor Indonesia ke kawasan pra-ACFTA selama kurun waktu 2003–2004 kurang dari 25%, tetapi persentase ini melebihi 25% selama kurun waktu 2005–2009. Yang menarik, persentase ekspor Indonesia ke kawasan pra-ACFTA pada tahun 2009 sudah melewati 30%. *Keempat*, persentase impor Indonesia ke kawasan pra-ACFTA selama

kurun waktu 2003–2009 adalah lebih besar dari ekspornya, yaitu mencapai lebih dari 30%. *Kelima*, Indonesia mengalami surplus dalam perdagangannya ke kawasan pra-ACFTA dalam tahun 2003–2004 dan 2006, tetapi mengalami defisit dalam kurun waktu 2005, 2007–2009 serta termasuk periode Januari–April 2010.

Berdasarkan perkembangan tersebut, Indonesia dalam konteks ACFTA cenderung dijadikan pasar bagi produk negara-negara yang tergabung dalam ACFTA. Fenomena sebagai pasar dalam konteks ACFTA akan menjadi dominan pada tahun-tahun berikutnya sebagai konsekuensi pembentukan ACFTA. Fenomena sebagai pasar bukan semata-mata karena kurangnya daya saing, tetapi juga dipengaruhi oleh konsumen Indonesia sendiri yang cenderung preferensinya terhadap produk dari luar negeri daripada produk Indonesia sendiri.

Total ekspor Indonesia selama kurun waktu 2003–2009 tumbuh rata-rata sebesar 12,15% setiap tahunnya, tetapi impornya tumbuh lebih besar daripada ekspornya dengan rata-rata sebesar 23,86%.<sup>19</sup> Selanjutnya, kondisi ini menjadi tantangan bagi para pelaku produsen Indonesia agar mampu memproduksi barangnya dengan harga yang lebih bersaing lagi. Tampaknya, Indonesia belum dapat memanfaatkan peluang pasar yang ada dalam kawasan ACFTA. Sejalan dengan perbaikan daya saing ini, konsumen Indonesia perlu diimbau untuk mengubah preferensinya terhadap

<sup>19</sup> Lihat Badan Pusat Statistik, *Indikator Ekonomi Mei 2010*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2010).

produk nasionalnya sendiri. Konsumen Indonesia diharapkan mulai belajar untuk mencintai produk nasional daripada produk luar negeri. Dalam hal ini, pendidikan untuk mencintai produk nasional menjadi sangat strategis untuk tetap mendominasi pasar domestik. Di samping itu, dalam jangka panjang, Indonesia-pun diharapkan agar mampu mengembangkan kemampuan teknologinya untuk mengembangkan pembentukan kapital nasionalnya sendiri seperti penguasaan teknologi prosesnya dalam rangka mendukung industri nasional. Hal ini akan sangat penting untuk investasi nasional, baik di dalam negeri maupun investasi ke luar negeri.

Dengan demikian, Indonesia dalam ACFTA memperlihatkan posisinya sebagai objek atau pasar bagi produk negara-negara mitranya, daripada sebagai subjek dalam konteks ACFTA. Indonesia tampaknya dimanfaatkan sebagai pasar produk negara-negara mitra ACFTA, daripada Indonesia memanfaatkan pasar negara-negara mitra ACFTA. Memang, defisit dalam konteks ACFTA masih dapat dibayar oleh hasil surplus perdagangan internasionalnya. Akan tetapi, secara strategi jangka panjang, pasar produk Indonesia di pasar internasional tentu akan dapat direbut oleh negara-negara mitra ACFTA, sepanjang Indonesia tidak mampu memperbaiki daya saingnya, baik dalam konteks produk maupun managerial. Kondisi ini menjadi ancaman jangka panjang yang serius.

### **Industri TPT Indonesia dalam CAFTA**

Sejalan dengan dinamika perekonomian Indonesia sejak kemerdekaan tahun 1945 hingga sekarang ini yang diwujudkan dalam serangkaian tahapan dan krisis,<sup>20</sup> industri TPT di Indonesia mampu berkontribusi secara signifikan dalam perekonomian nasional. Industri TPT nasional

<sup>20</sup> Untuk ulasan krisis dalam kurun waktu 1960–1980-an, lihat Iwan Jaya Azis, “Indonesia”, dalam John Williamson (Ed.), *The Political Economy of Policy Reform*, (Washington, D.C.: Institute for International Economics, 1994), hlm. 385–416; untuk uraian krisis dalam kurun waktu 1960–1990-an, lihat Wing Thye Woo, Bruce Glassburner, dan Anwar Nasution, *Macroeconomic Policies, Crises, and Long-Term Growth in Indonesia 1965-90*, (Washington, D.C.: The World Bank, 1994); untuk analisis krisis pada 1997–1998, lihat World Bank, *Indonesia in Crisis: A Macroeconomic Update*, (Washington, D.C.: The World Bank, 1998), dan World Bank, *Indonesia from Crisis to Opportunity*, (Washington, D.C.: The World Bank, 1999).

pernah berpredikat sebagai primadona ekspor, tetapi sekarang ini predikat itu memudar. Walaupun begitu, industri TPT nasional masih memperlihatkan diri sebagai satu produk ekspor unggulan. Status perkembangannya sekarang ini tentunya tidak muncul begitu saja, melainkan dalam konteks kurun waktu kesejarahannya yang panjang sejak awal keberadaannya di Indonesia. Penelusuran ke titik awal keberadaannya di Indonesia memang belum dapat dipastikan karena minimnya studi historis tentang industri TPT yang cukup mendalam. Memang beberapa studi pernah dilakukan, tetapi kebanyakan studi ini berkaitan dengan penyusunan skripsi S1 di beberapa perguruan tinggi.

Pada umumnya, masyarakat suku bangsa yang hidup sepanjang kepulauan Nusantara memiliki kemampuan komunitas untuk memenuhi kebutuhan sandang mereka. Kemampuan komunitas mereka itu ditunjukkan oleh kemampuan setiap suku bangsa di Indonesia dalam pembuatan kain tenun tradisional mereka. Akibatnya, mereka dikenal sebagai pembuat jenis kain tenun dan rajut tradisional yang bernilai tinggi seperti kain tenun Silungkang, di samping tentunya termasuk kegiatan membatik, sebagai suatu aktivitas kesenian, sejak kerajaan Hindu di Indonesia, khususnya sejak zaman Kerajaan Majapahit dan pengembangannya pada zaman Kerajaan Mataram, dan kemudian berlanjut pada masa Kerajaan Surakarta dan Yogyakarta.<sup>21</sup> Pada masa ini, produk pakaian tenun/rajut dan batik lebih diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan sendiri, dan/atau kepentingan seni budaya. Baru pada akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, kesenian batik meluas sebagai kesenian milik rakyat Indonesia yang tidak merujuk kepada suku Jawa saja. Pada masa ini, batik yang dihasilkan berupa batik tulis hingga awal abad ke-20, dan batik cap baru dikembangkan pada akhir Perang Dunia I.<sup>22</sup> Periode ini diasumsikan sebagai periode pra-sejarah bagi industri TPT di Indonesia.

Kemampuan tradisional tersebut kemudian ditunjang oleh penggunaan alatnya, yakni Alat

<sup>21</sup> Ilyaul Ulum M.D., “Batik dan Kontribusinya terhadap Perekonomian Nasional”, *Jurnal Bestari: E-Journal Universitas Muhammadiyah Malang*, Vol. 42 (2009), hlm. 23.

<sup>22</sup> Lihat “Sejarah Batik di Indonesia”, [http://pesonabatik.site40.net/Sejarah\\_Batik.html](http://pesonabatik.site40.net/Sejarah_Batik.html), diunduh pada 9 Juli 2010.

Tenun Bukan Mesin (ATBM) atau *Textile Inrichting* Bandung (TIB) *Gethouw* yang ditemukan oleh *Daalennoord* pada tahun 1926. Secara teknis, ATBM merefleksikan cara atau metode pertenunan dan perajutan sederhana untuk memproduksi kain tekstil tradisional seperti sarung, kain panjang, lurik, stagen atau sabut, dan selendang. Penggunaan alat ini memungkinkan berubahnya konsentrasi pembuatan kain tenun tradisional maupun batik yang semula hanya kebutuhan sendiri dan bersifat kultural mulai bergerak kepada kegiatan komersial, walaupun masih dalam taraf industri rumahan. Kondisi ini sekaligus mengakhiri masa prasejarah dan mengawali tahap cikal bakal pembentukan industri TPT di Indonesia pada akhir dasawarsa 1920-an. Dengan ditemukannya ATBM ini, industri tekstil berkembang sejak tahun 1929 dalam skala industri rumahan.

Sepuluh tahun kemudian, industri tekstil memasuki tahap mesin dengan diciptakannya Alat Tenun Mesin (ATM) yang untuk pertama kalinya digunakan di daerah Majalaya, Jawa Barat, pada tahun 1939. Penggunaan ATM menjadikan industri tekstil ini memasuki tahapan komersial. Listrik sebagai bahan bakar energinya memang sudah masuk ke daerah Majalaya sejak empat tahun sebelumnya, 1935.<sup>23</sup> Sejalan dengan perkembangan ini, para pelaku industri batik rumahan kemudian membentuk koperasi batik, sebagaimana para pengrajin batik di Pekajangan yang membentuk koperasi batik pada tahun 1937, dan kemudian semakin marak pembentukan koperasi batik di berbagai daerah.<sup>24</sup>

Dengan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, cikal bakal industri TPT kemudian menjadi modal bagi tahap pembentukan awal industri TPT di Indonesia yang ditandai dengan dibentuknya Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) pada tanggal 18 September 1948 di Yogyakarta dengan tujuan untuk mempersatukan kekuatan dan potensi koperasi batik yang menyebar di

seluruh Indonesia. Perkembangan ini mungkin ditunjang oleh kebijakan ekonomi pemerintah pada awal-awal kemerdekaan. Misalnya, pada kurun waktu 1945–1949, kebijakan ekonomi pemerintah ketika itu lebih difokuskan pada rehabilitasi pabrik-pabrik yang rusak sebagai akibat perang dan perbaikan sarana fisik dan mendorong perluasan fasilitas-fasilitas fisik dan pengadaan sarana baru dalam perindustrian. Pada masa ini, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditugaskan untuk melakukan intervensi dalam perekonomian nasional secara menyeluruh.<sup>25</sup>

Perkembangan industri TPT Indonesia sejak saat itu dan selanjutnya mengikuti dinamika perekonomian Indonesia yang lebih banyak disuntik oleh konflik Indonesia-Belanda selama kurun waktu 1945–1949 dan berlanjut sampai tahun 1962. Kondisi ini memberi dampak perusak yang luar biasa bagi penyusunan tatanan perekonomian nasional. Presiden Soekarno selama dua puluh tahun berusaha untuk menyusun bentuk politik dan ekonomi Indonesia secara terus menerus, tetapi sia-sia dalam menemukan dasar kebijakan perekonomian nasional.<sup>26</sup>

Walaupun begitu, Presiden Soekarno sempat melancarkan kebijakan Sandang Pangan Rakyat. Kebijakan yang memandang bahwa batik sebagai pakaian umum ini sangat menguntungkan pihak GKBI karena GKBI mendapat perlindungan seperti tunjangan harga kain putih dan hak peredaran secara monopolis. Dengan kebijakan ini, pemerintah ketika itu menargetkan untuk menyuplai batik cap yang murah kepada orang awam. Pada akhirnya, para pembatik di berbagai daerah memperoleh banyak keuntungan.<sup>27</sup> Pada dasawarsa 1950-an, pemerintah melalui Bank Industri Negara mendukung pendirian industri baru seperti industri pemintalan, yaitu *Naamloze Vennootschap* (NV) Pemintalan Jantra dan PT

<sup>25</sup> Titik Anas, "Industri Manufaktur Indonesia: Perjalanan Lima Puluh Tahun", dalam Bantarto Bandoro *et al.* (Ed.), *Refleksi Setengah Abad Kemerdekaan Indonesia*. (Jakarta: CSIS, 1995), hlm. 739.

<sup>26</sup> Lihat JAC Mackie, "Periode 1941-1965 sebagai Selingan dalam Pembentukan Ekonomi Nasional: Bagaimana Sebaiknya Kita Menafsirkan", dalam J. Thomas Lindblad (Ed.), *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, (Yogyakarta: Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM-Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 394-415.

<sup>27</sup> Lihat "Sejarah Terbentuknya Gabungan Koperasi Batik Indonesia", *Op.Cit.*

<sup>23</sup> Lihat "Bagian II: Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia", diunduh pada 8 Februari 2010 dari <http://egismy.wordpress.com/2008/04/18/bagian-ii-industri-tekstil-dan-produk-tekstil-tpt-indonesia/>.

<sup>24</sup> Lihat "Sejarah Terbentuknya Gabungan Koperasi Batik Indonesia", diunduh dari <http://aziz27.wordpress.com/2009/06/29/gabungan-koperasi-batik-indonesia/> pada 26 Agustus 2010.



Pemintalan Kakas Cilacap serta pabrik karung yang bernama NV Pabrik Karung Rosella.<sup>28</sup> Studi yang dilakukan oleh Ingrid Palmer dan Lance Castle mengungkapkan tentang bagaimana industri TPT Indonesia tumbuh secara luar biasa atas dasar penggunaan alat ATBM dan ATM selama kurun waktu 1930–1969. Jumlah ATBM meningkat lebih dari 1.000 kali lipat dalam jangka waktu 39 tahun, dari 257 ATBM pada tahun 1930 menjadi 280.000 ATBM pada tahun 1969. Sementara itu, jumlah ATM meningkat 613 kali lipat dalam jangka waktu 39 tahun, dari hanya 44 ATM pada tahun 1930 menjadi 27.000 ATB pada tahun 1969.<sup>29</sup> Hal ini menunjukkan fakta bahwa transformasi dalam industri TPT berlangsung sangat cepat, yang didominasi oleh sektor tenun tangan di sentra tekstil Bandung-Majalaya hingga tahun 1960.<sup>30</sup>

Selanjutnya, pada masa dasawarsa 1960-an, industri TPT di Indonesia memasuki tahap pembangunan. Tahap pembangunan industri TPT ini justru berlangsung dalam konteks yang tidak menguntungkan, yakni iklim ekonomi terpimpin pada masa Orde Lama, selama kurun waktu 1958–1965. Kondisinya diawali oleh kemandekan perekonomian hingga berpuncak pada kekacauan perekonomian Indonesia.<sup>31</sup> Ketika itu, pemerintah Indonesia membentuk Organisasi Perusahaan Sejenis (OPS) sesuai dengan sektornya, seperti OPS Tenun Mesin; OPS Tenun Tangan; OPS Perajutan; OPS Batik; dan lain sebagainya. OPS ini dikoordinasikan oleh Gabungan Perusahaan Sejenis (GPS) Tekstil yang pengurusnya ditetapkan dan diangkat oleh Menteri Perindustrian Rakyat. Usai pembentukan OPS sektoral dalam industri TPT ini, OPS dan GPS dilebur pada pertengahan

<sup>28</sup> John O. Sutter, “Indonesianisasi Politics in a Changing Economy, 1940–1955, Vol. II: Sovereign Indonesia Strive for a National Economy, (New York: Cornell University, 1959), hlm. 786–790.

<sup>29</sup> Lihat Ingrid Palmer dan Lance Castles, “The Textile Industry”, dalam Bruce Glassburner (Ed.), *The Economy of Indonesia, Selected Reading*, (New York: Cornell University Press, 1971), hlm. 319; lihat juga Soeri Suroto, “Sejarah Kerajinan di Indonesia”, *Prisma No. 8* (Agustus, 1983).

<sup>30</sup> Ingrid Palmer, *Textiles in Indonesia: Problem of Import Substitution*, (New York: Praeger, 1972).

<sup>31</sup> Mari Pengestu, “Sekilas Pandang Perekonomian Indonesia selama 50 Tahun Merdeka”, dalam Bantarto Bandoro *et al.* (Ed.), *Op.Cit.*, hlm. 628.

tahun 1965-an menjadi satu dengan nama OPS Tekstil dengan beberapa bagian menurut jenisnya atau subsektornya, yaitu pemintalan (*spinning*); pertenunan (*weaving*); perajutan (*knitting*); dan penyempurnaan (*finishing*). Disamping organisasi bentukan pemerintah tersebut, industri TPT di Indonesia pun hingga tahun 1970 diwarnai oleh berbagai organisasi seperti Perteksi; *Printer’s Club* (kemudian menjadi *Textile Club*); perusahaan milik pemerintah (Industri Sandang, Pinda Sandang Jabar, Pinda Sandang Jateng, Pinda Sandang Jatim), dan Koperasi (GKBI, Inkopteksi). Pada akhirnya, tanggal 17 Juni 1974, organisasi-organisasi dalam lingkup industri TPT tersebut melaksanakan kongresnya yang menyepakati pendirian Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) dan sekaligus menjadi anggota API.<sup>32</sup>

Pascapembentukan API, atau pasca-pembentukan Undang-undang (UU) Penanaman Modal Asing (PMA), perkembangan industri TPT memasuki tahap yang baru ketika investasi asing mulai merambah sektor TPT. Hal ini ditandai oleh masuknya investasi dari Jepang di subsektor industri hulu (*spinning* dan *man-made fiber making*). Pada periode 1970–1985, industri TPT Indonesia tumbuh lamban serta terbatas dan hanya mampu memenuhi pasar domestik (substitusi impor) dengan *segmen* pasar menengah-rendah. Sebaliknya, setelah tahun 1986, industri TPT Indonesia mulai tumbuh pesat karena dua sebab. *Pertama*, iklim usaha di dalam negeri sudah kondusif, seperti regulasi pemerintah yang efektif dengan fokus pada ekspor non-migas. *Kedua*, industri TPT Indonesia mampu memenuhi *standar* kualitas yang tinggi untuk memasuki pasar ekspor di *segmen* pasar atas-*fashion*.

Periode 1986–1997 adalah masa globalisasi industri TPT yang ditandai oleh masuknya produk TPT dalam Babak Perundingan Uruguay.<sup>33</sup> Kinerja ekspor industri TPT Indonesia terus meningkat dan membuktikan sebagai industri yang strategis dan sekaligus sebagai andalan penghasil devisa negara sektor non-migas. Pada periode ini pakaian jadi merupakan komoditas primadona, sedangkan pada periode 1998–2002,

<sup>32</sup> Lihat “Bagian II: Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia”, *Op.Cit.*

<sup>33</sup> Lihat Agus R. Rahman (Ed.), *Globalisasi dan Gerakan Anti-Globalisasi di Indonesia*, (Jakarta: LIPI Press, 2007).

**Tabel 3.** Ekspor Industri TPT Indonesia ke AFTA dan ACFTA Tahun 2007–2008 dan Jan–Mar 2010

No.	Negara	2007	2008	Jan–Mar 2010
1.	Brunei Darussalam	2.982.829	3.603.394	1.038.454
2.	Filipina	92.285.751	69.321.341	15.337.304
3.	Malaysia	289.019.573	229.253.840	48.747.027
4.	Singapura	159.263.498	124.533.686	23.321.918
5.	Thailand	123.109.617	143.150.167	33.779.086
	AFTA	666.661.628	569.862.428	122.223.789
6.	China	163.721.664	178.413.559	61.443.646
7.	Hong Kong	119.225.322	83.547.463	0
	ACFTA	949.643.653	831.823.450	183.667.435

Sumber: Bahan diolah dari data Badan Pusat Statistik, *Ekspor/Impor, 2007–2008 dan Ekspor Maret 2010*.

industri TPT memasuki masa paling sulit. Kinerja ekspor TPT nasional menunjukkan arah yang bersifat fluktuatif. Pada periode ini, kinerjanya dapat dikatakan sebagai periode *chaos, rescue*, dan *survival*.<sup>34</sup> Industri TPT di Indonesia memasuki masa senja karena berbagai hambatan, baik dalam negeri maupun internasional, yang memerlukan perjuangan panjang dan berkelanjutan.<sup>35</sup> Bahkan, sejak tahun 2002, industri TPT Indonesia dihadapkan pada kondisi persaingan sejalan dengan pemberlakuan AFTA yang membuka persaingan, baik antarpasar maupun antarpelaku industri di tingkat ASEAN. Pasar TPT domestik akan disuplai produk sejenis dari sesama negara-negara anggota ASEAN. Konon, industri TPT kurang maksimal untuk mempersiapkan diri sehingga kelihatan bahwa daya kompetitif industri TPT Indonesia terasa tercecer karena tidak dipersiapkan sejak sepuluh tahun yang lalu.<sup>36</sup>

Dengan kata lain, industri TPT Indonesia pada awal abad ke-21 juga dihadapkan kepada kecenderungan arus regionalisasi seperti AFTA yang kompetisinya semakin meningkat.<sup>37</sup> Hal

ini menandakan fakta bahwa industri TPT di Indonesia memasuki tahapan krisis pertama, yang sesungguhnya industri TPT Indonesia belum selesai secara tuntas mengantisipasi kondisi krisis. Pada waktu berikutnya, industri TPT Indonesia pun memasuki tahapan krisis yang kedua, ketika pada tahun 2005, kuota tekstil TPT di negara maju dihapuskan serta negara-negara anggota ASEAN berancang-ancang mengembangkan AFTA menjadi ACFTA, yang akan direalisasikan pada bulan Januari 2010.

Periode 2003–2006 merupakan periode *out-standing rehabilitation, normalization*, dan *expansion (quo vadis)*. Upaya revitalisasi ini berlangsung seperti jalan di tempat, yang disebabkan oleh multi-kendala. Di antara multi-kendala ini yang utama adalah (i) sulitnya sumber pembiayaan; dan (ii) iklim usaha yang tidak kondusif. Periode pertengahan tahun 2007, industri TPT memasuki tahap restrukturisasi permesinan, bersamaan dengan ancaman/tantangan dan peluang dari terbentuknya ACFTA. Dalam pembentukan ini, China menjadi motor penggerak dalam konteks ACFTA, dan ACFTA sendiri tidaklah berdiri sendiri, melainkan merupakan pengembangan dari AFTA yang terbentuk lebih dahulu.

Dengan periode sejarah yang cukup panjang ini, industri TPT Indonesia sungguh memperlihatkan kekuatan alamiahnya sebagai satu industri asli Indonesia. Kinerja industri TPT pada tahun 2009 menjadi titik tolak bagi masa depan industri TPT Indonesia karena pada awal tahun 2010 ini, industri TPT Indonesia didera oleh konsep perdagangan bebas kawasan ACFTA. Negara-negara anggota ASEAN ini baru dapat menerima

<sup>34</sup> Lihat “Bagian II: Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia”, *Loc. Cit.*

<sup>35</sup> Lihat Ratna S. Widyastuti, “Tekstil: Industri Laruk Sanjo yang Harus Berjuang”, dalam Salomo Simanungkalit (Ed.), *Indonesia dalam Krisis 1997–2002*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002), hlm. 159–161.

<sup>36</sup> Lihat M. Chatib Basri, “Habisnya Kuota TPT, Habisnya TPT Kita? dalam Hadi Soesastro, Ed., *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*, (Jakarta: ISEI-Kanisius, 2005), hlm. 496–500.

<sup>37</sup> Lihat Haryo Aswicahyono dan Imelda Maidir, “Indonesia’s Textiles and Apparels Industry: Taking a Stand in the New International Competition”. *CSIS Working Paper Series WPE 064* (February, 2003).

China tanpa kecurigaan setelah China bergabung dalam WTO, yang mau tidak mau China pun harus mengakui prinsip-prinsip internasional yang dianut oleh WTO.

Industri TPT Indonesia secara keseluruhan terus berkembang jumlahnya, baik dalam skala industri besar maupun industri menengah, yang meliputi tekstil dan pakaian jadi, serat tekstil, benang, pita, tenun, dan produk tekstil lainnya. Berdasarkan data dari API, jumlah perusahaan TPT di Indonesia, baik skala industri besar maupun UKM (Usaha Kecil dan Menengah) mencapai 7.708 perusahaan pada tahun 2007. Pada tahun yang sama, perusahaan TPT di Indonesia yang bangkrut mencapai 2.473 perusahaan sejak tahun 2003, ketika jumlah perusahaan TPT Indonesia mencapai 10.181 perusahaan. Dari jumlah perusahaan TPT yang bangkrut itu, sebagian terbesar didominasi perusahaan TPT skala menengah atau UKM, sedangkan perusahaan TPT skala besar dapat bertahan.<sup>38</sup> Aktivitas perusahaan TPT khusus perusahaan tekstil dan pakaian jadi pada tahun 2007 yang berjumlah 2.704 perusahaan itu tersebar di tujuh lokasi. Dari ketujuh lokasi industri TPT Indonesia, mereka masih tetap terkonsentrasi di Jawa Barat yang mencapai 57%, kemudian disusul Jakarta sebesar 17%, Jawa Tengah mencapai 14%, Jawa Timur sebesar 6%, Bali mencapai 3%, Sumatra sebesar 2%, dan Yogyakarta mencapai 1%.<sup>39</sup>

Industri TPT Indonesia sudah terangkai dan terkait antara industri hulu, industri antara, hingga hilirnya sehingga mereka berhubungan satu sama lain atau saling pengaruh. Dalam hal ini, industri hulu TPT nasional mampu men-*supply* sebagian besar industri hilir TPT nasional. Pada tataran hulu, yaitu industri serat, industri serat nasional pada tahun 2007 memproduksi 800 ribu ton yang kemudian diekspor sebesar 220 ribu ton atau 27,5% dari produksi nasional, namun Indonesia juga masih mengimpor serat sebesar 705 ribu ton. Jumlah bahan serat nasional yang tersedia ini menjadi bahan baku bagi industri benang nasional. Produk industri benang nasional pada tahun

2007 mencapai 1.680 ribu ton yang kemudian diekspor sebanyak 800 ribu ton atau 47,6% dari produksi nasional, disamping tentunya Indonesia masih impor benang sebesar 90 ribu ton. Jumlah bahan benang nasional yang tersedia ini menjadi bahan baku bagi industri kain nasional. Produksi industri kain nasional pada tahun 2007 sebesar 970 ribu ton yang kemudian diekspor sebesar 320 ribu ton, disamping Indonesia masih mengimpor kain dalam jumlah 110 ribu ton. Jumlah kain nasional yang tersedia ini adalah sebagai bahan baku bagi industri garmen, UKM garmen, dan produk lainnya. Produksi industri garmen nasional pada tahun 2007 mencapai 410 ribu ton yang kemudian diekspor sebesar 380 ribu ton, tetapi Indonesia masih impor garmen sebesar 20 ribu ton. Untuk UKM garmen, sektor ini mampu memproduksi 230 ribu ton untuk pasar domestik. Sementara itu, industri produk lainnya mencapai produksi 120 ribu ton, yang kemudian diekspor sebesar 110 ribu ton dan Indonesia masih mengimpornya dalam jumlah 68 ribu ton. Dengan demikian, pasar domestik untuk produk TPT pada tahun 2007 mencapai 358 ribu ton atau setara dengan 1,97 miliar dolar AS.<sup>40</sup>

Ekspor industri TPT Indonesia ke kawasan ACFTA pada tahun 2007 dan 2008 menurun secara keseluruhan, kecuali Brunei Darussalam dan Thailand untuk kawasan AFTA, dan China untuk kawasan ACFTA. Nilai ekspor industri TPT Indonesia ke kawasan AFTA pada tahun 2007 mencapai hanya 1,46% dari total ekspor Indonesia ke AFTA, dan menurun hingga 0,62% pada tahun 2008. Sementara itu, nilai ekspor industri TPT Indonesia ke kawasan ACFTA pada tahun 2007 hanya sebesar 1,67% dari total ekspor Indonesia ke kawasan ACFTA, dan menurun hingga 0,79% pada tahun 2008. Sementara itu, ekspor industri TPT Indonesia ke kawasan ACFTA untuk tiga bulan pertama, Januari–Maret 2010, mencapai nilai 183,668 juta dolar AS. Secara rinci, ekspor industri TPT Indonesia ke kawasan AFTA dan ACFTA selama 2007–2008 dapat ditelusuri pada Tabel 3.

Dengan persentase yang kecil ini, industri TPT Indonesia tidak mengandalkan kawasan AFTA dan ACFTA sebagai pasaran ekspor produk TPT Indonesia. Industri TPT Indonesia masih

<sup>38</sup> Asosiasi Pertekstilan Indonesia, "Indonesia Textile & Apparel Highlight", [www.indonesiatextile.com](http://www.indonesiatextile.com), diunduh pada 26 Agustus 2010.

<sup>39</sup> Benny Sutrisno, "Memacu Konsumsi dan Permintaan Produk TPT Indonesia di Pasar Domestik", [www.indonesiatextile.com](http://www.indonesiatextile.com), diunduh pada 26 Agustus 2010.

<sup>40</sup> *Ibid.*

tetap mengandalkan pada pasar AS, Jepang, dan UE. Dari sisi pasaran luar negeri, hal ini tidaklah mengkhawatirkan karena para pelaku ekspor TPT Indonesia ke pasar internasional adalah produsen skala besar. Yang mengkhawatirkan adalah Indonesia pun menjadi pasar bagi produk TPT mitra AFTA dan ACFTA. Secara khusus, produk TPT dari China menjadi ancaman nyata bagi produk TPT domestik untuk pasar domestik.

Hal ini dapat dilihat sepanjang 2008–2009 saja, sekitar 426 perusahaan TPT telah gulung tikar akibat kalah bersaing dengan TPT impor asal China, menyusul tingginya biaya produksi yang memicu inefisiensi. Total tenaga kerja yang dirumahkan akibat penutupan itu mencapai 78.158 orang. Menurut catatan API, arus impor TPT terus menanjak dari tahun ke tahun. Pada 2008, impor TPT China meroket 197% menjadi US\$1,034 miliar dibandingkan dengan impor pada 2007. Pada 2009, nilai impor meningkat lagi 11% menjadi US\$1,144 miliar. Padahal pada 2006 dan 2007 impor asal China masing-masing hanya US\$262 juta dan US\$348 juta.<sup>41</sup>

Dengan demikian, sejalan dengan waktu, industri TPT Indonesia dihadapkan kepada ancaman/tantangan yang serius. Ancaman/tantangan pertama muncul ketika produk TPT dimasukkan ke dalam disiplin GATT selama perundingan *Uruguay Round*. Kedua, produk TPT Indonesia pun dihadapkan pada kompetisi dalam konteks AFTA. Ketiga, produk TPT Indonesia dihadapkan pada kompetisi dalam konteks ACFTA. Ancaman/tantangan yang ketiga ini bersifat lebih ketat dibandingkan dengan ancaman/tantangan dalam konteks AFTA.

Dalam menghadapi ketiga ancaman itu, para pelaku industri TPT yang berskala besar, terutama 20 perusahaan TPT yang telah masuk bursa, akan mampu mengatasi ketiga ancaman tersebut. Akan tetapi, bagi para pelaku industri TPT yang berskala menengah dan kecil, mereka masih memerlukan dukungan pemerintah dan konsumen domestik, agar mereka tetap dapat bertahan. Suatu hal yang menjadi magnet bagi industri TPT Indonesia adalah penetapan United Nations for Education, Social and Cultural Organization (UNESCO) terhadap batik sebagai

warisan budaya Indonesia. Hal ini sangatlah luar biasa sehingga Presiden Susilo B. Yudhoyono pun menghimbau agar seluruh rakyat Indonesia untuk mengenakan batik pada tanggal 2 Oktober 2009.<sup>42</sup>

Dengan pengakuan ini, batik bukan hanya milik Indonesia, tetapi ia menjadi bagian dari warisan dunia. Kita lihat saja, bagaimana senangnya Nelson Mandela ketika ia mengenakan batik dari Indonesia, maupun orang Afrika Selatan yang mencoba mengembangkan batik versi Afrika Selatan dengan sebutan kemeja Madiba.<sup>43</sup> Indonesia diakui sebagai rumah asal bagi eksistensi batik yang didukung oleh komunitas, industri, konsumen, budaya dan sejarah batik. Hingga sekarang ini, setiap daerah mengembangkan batik daerahnya, tidak kecuali di Irian dengan batik Iriannya.<sup>44</sup>

Dari sini, kemudian, industri batik sontak bangkit kembali yang didukung oleh keputusan untuk memakai pakaian batik pada setiap Jumat, baik bagi pegawai negeri sipil maupun karyawan swasta. Di mana-mana, kita melihat pemandangan orang-orang berbatik di seluruh Nusantara ini, di luar kebiasaan acara resepsi pernikahan yang biasa juga orang menggunakan pakaian batik. Dengan demikian, industri TPT seolah mendapat energi baru agar industri TPT tidak menjadi industri senja, melainkan tetap menjadi industri terkemuka yang melambungkan *trade mark* Indonesia.

Sebenarnya, hal ini sudah dimulai ketika beberapa perancang mulai menggunakan kain batik berkualitas tinggi sebagai bahan rancangannya, yang satu di antaranya adalah perancang Iwan Tirta.<sup>45</sup> Walaupun begitu, industri TPT masih terus hingga kini dihindangi oleh serangkaian problem. *Pertama*, problem yang paling utama dalam industri TPT di Indonesia adalah soal

<sup>42</sup> Lihat "President Requests Wearing Batik on October 2<sup>nd</sup>", 17 September 2009, diunduh dari [http://www.indonesia.go.id/en/index.php?option=com\\_content&task=view&id=8036&Itemid=701](http://www.indonesia.go.id/en/index.php?option=com_content&task=view&id=8036&Itemid=701), pada 9 Juli 2009.

<sup>43</sup> Lihat "Piala Dunia: di Afsl Nama Batik Diubah", diunduh dari <http://bola.kompas.com/read/xml/2010/06/20/15013315/Di.Afsl..Nama.Batik.Diubah>, pada 9 Juli 2010.

<sup>44</sup> Lihat Michael B. Cookson. *Batik Irian: Imprints of Indonesia Papua*, (Canberra: Australian National University, 2008).

<sup>45</sup> Iwan Tirta, *Batik: A Play of Light and Shades*, (Jakarta: Gaya Favorit Press, 1996).

<sup>41</sup> [http://sekbertal.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=2388&Itemid=-85](http://sekbertal.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2388&Itemid=-85), diunduh pada 13 Juni 2010.

bahan baku, yakni kapas. Selama ini, industri tekstil di Indonesia mengandalkan pada impor bahan baku kapas. Total impor untuk kebutuhan industri kapas Indonesia sebesar dua miliar dolar AS per tahun dari negara asal impor yang berbeda-beda tiap tahunnya, yang tentunya tergantung dari harga yang ditawarkan. Hingga kini, Indonesia lebih banyak mengimpor bahan baku ini dari Afrika Barat seperti Kenya dan lainnya.<sup>46</sup> Hal ini merupakan titik lemah industri tekstil Indonesia sehingga para pengusaha perlu mendesain konsep pemenuhan bahan baku dalam jangka panjang.

Problem utama yang *kedua* adalah permesinan yang sudah cukup tua sehingga industri TPT di Indonesia memerlukan restrukturisasi permesinan. Pemerintah sejak tahun 2007 meluncurkan kebijakan restrukturisasi permesinan tekstil hingga tahun 2010 atau 2011. Dalam hal ini, pemerintah menerapkan dua skema, yaitu skema A yang berupa potongan harga terhadap nilai investasi mesin baru dan skema B dalam bentuk bantuan kredit berbunga rendah bagi perusahaan TPT skala kecil dan menengah. Akan tetapi, realisasi program restrukturisasi ini dihadapkan beberapa kendala, seperti pailit dan terjadinya perubahan manajemen.<sup>47</sup> Tentunya, industri TPT Indonesia masih menyimpan hal-hal lainnya yang cukup krusial, yaitu masalah pasokan energi dan buruh.

Akan tetapi, dalam hal pasar, pasar ekspor TPT Indonesia selama ini tampaknya bukan kawasan AFTA. Bahkan pada tiga bulan pertama tahun 2010, ekspor TPT Indonesia bukan ke wilayah ACFTA, walaupun memang beberapa negara ACFTA menyerap impor TPT dari Indonesia dengan cukup besar. Kawasan ACFTA memang memperlihatkan pasar yang sangat besar karena 1,8 miliar jiwa di kawasan ACFTA ini memerlukan pakaian dalam segala bentuk, baik pakaian dalam maupun pakaian luar.

Lagi pula, dalam hal karakter pasar domestik, sasaran TPT China di lingkungan ACFTA adalah pasar konsumen menengah ke bawah dengan

harga sangat murah dan kualitas yang rendah, terutama batik cap dengan motif dan sapuan warna khas China yang berbeda. Sementara itu, dari sekitar seratus pabrik tekstil di Jatim, sebagian besar fokus pada pasar menengah. Mereka hampir tidak ada yang bermain pada pasar menengah ke bawah. Dengan demikian, TPT China dan TPT Jatim memperlihatkan pasar yang berbeda. Oleh karena itu, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jawa Timur menyatakan bahwa masuknya produk tekstil China tidak terlalu berpengaruh. Bahkan, Ketua API Jawa Timur juga mengatakan bahwa pada satu sisi tidak selamanya perdagangan bebas ACFTA itu berdampak buruk. Pada sisi yang lain, ACFTA banyak manfaatnya. Misalnya dalam waktu dekat beberapa perusahaan tekstil China menjajaki kerja sama dengan perusahaan tekstil di Jatim. Sekarang masih dalam taraf negosiasi. Dia ingin kerja sama ini bisa lebih menguntungkan industri tekstil Jatim.<sup>48</sup> Bahkan, perdagangan bebas AFTA dan ACFTA sesungguhnya menjadikan kawasan ini sebagai basis produksi TPT dunia.

Untuk wilayah Yogyakarta, industri TPT dihadapkan kepada situasi yang paling sulit ketika industri TPT ini hanya mengandalkan pasar domestik. Sebagian besar industri TPT yang berskala pasar domestik merupakan UKM yang diperkirakan akan kalah bersaing dengan produk TPT China yang membanjiri pasar domestik. Walaupun industri TPT Indonesia yang berskala UKM sekarang ini memang telah memiliki daya saing, tetapi daya saing mereka sangat lemah.<sup>49</sup> Di kota lainnya seperti Semarang, kehadiran batik China di ibu kota Jawa Tengah ini sudah berlangsung sejak tahun 2008, dan diminati oleh kalangan remaja Semarang, baik di pasar modern seperti Kompleks SCJ Plaza maupun pasar tradisional seperti Pasar Johar. Para pedagang ini sebagian besar hanya mengetahui bahwa TPT ini didatangkan dari Jakarta dan tidak menyadari bahwa TPT itu adalah produk China.<sup>50</sup>

<sup>48</sup> <http://ekonomibisnis.suarasurabaya.net/?id=11854edd13f8f20790fe0864a4c40506201077607>, diunduh pada 12 Juni 2010.

<sup>49</sup> Lihat "ACFTA Ancam Industri Berbasis Pasar dalam Negeri", *Antara*, 7 Januari 2010.

<sup>50</sup> Lihat "Batik China Diminati Remaja Semarang", *Kompas*, 27 September 2008, diunduh pada 31 Juli 2010 dari <http://nasional.kompas.com/read/2008/09/27/22170813/Batik.China.Diminati.Remaja.Semarang>.

<sup>46</sup> "99% Kebutuhan Kapas Indonesia Masih Diimpor", diunduh dari <http://bataviase.co.id/node/249568>, pada 13 Juni 2010.

<sup>47</sup> "Anggaran Restrukturisasi Mesin Tekstil Dipangkas 40%", diunduh dari [http://sekbertal.org/index.-php?option=com\\_content&task=view&id=2368&Itemid=85](http://sekbertal.org/index.-php?option=com_content&task=view&id=2368&Itemid=85), pada 13 Juni 2010.

Sementara itu, TPT China makin banyak dipasarkan di mal dan pertokoan Bandar Lampung, bahkan merambat ke pasar-pasar tradisional. Produk dari China ini paling gencar dipasarkan oleh sejumlah mal dengan potongan harga yang cukup besar. Selain itu, pembeli di kota Bandar Lampung sangat beranimo untuk membeli produk TPT China ini karena harganya yang relatif murah, bahkan lebih murah daripada TPT Indonesia sendiri, dan modelnya yang lebih kaya. Yang menyedihkan justru diperlihatkan oleh beberapa konsumen domestik ini bahwa mereka tidak mengetahui kalau TPT yang hendak dibelinya itu adalah buatan China.<sup>51</sup>

Untuk wilayah Jakarta, informasi salah satu pedagang tekstil di Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat mengungkapkan bahwa TPT China dinilai memiliki kualitas yang jauh lebih bagus dibandingkan dengan produk lokal dari UKM. TPT China juga mendominasi pasar tekstil di Pasar Tanah Abang tersebut yang mencapai 80%, sedangkan sisanya merupakan produk lokal. Mereka cenderung lebih memilih produk China dilihat dari segi kualitas dan harga yang relatif lebih rendah dibandingkan produk lokal.<sup>52</sup>

## Kesimpulan

Kawasan perdagangan bebas ACFTA merupakan pengembangan dari AFTA yang dirasakan masih kurang maksimal. Kurang maksimalnya AFTA ini dirasakan sebagai penghambat momen integrasi kawasan yang menuntut revitalisasi untuk mengantisipasi dinamika globalisasi. Oleh karena itu, dalam rangka revitalisasi inilah, negara-negara anggota ASEAN memerlukan aktor luar ASEAN untuk memicu AFTA agar semakin berani dan komitmen menuju integrasi kawasan.

Masuknya aktor China ke dalam mekanisme perdagangan bebas ACFTA selanjutnya membuka persaingan yang frontal antara produk TPT impor China dengan produk TPT domestik yang sebagian besar adalah berskala kecil dan

<sup>51</sup> Lihat "Produk China Banjiri Bandarlampung", *Antara*, 7 Januari 2010.

<sup>52</sup> Lihat "Ekspansi Produk China Memberi Tekanan kepada Produk Lokal", diunduh dari [http://www.harian-global.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=37578:ekspansi-produk-china-memberi-tekanan-kepada-produk-lokal&catid=57:gagasan-&Itemid=65](http://www.harian-global.com/index.php?option=com_content&view=article&id=37578:ekspansi-produk-china-memberi-tekanan-kepada-produk-lokal&catid=57:gagasan-&Itemid=65), pada 4 Juni 2010.

menengah. Industri TPT domestik tidak mampu menghadapi produk TPT dari China. Akan tetapi, industri TPT Indonesia pun mendapat energi baru dengan batik dinobatkan sebagai warisan dunia yang perlu dilestarikan. Industri batik kemudian sontak bangkit kembali untuk menjadikan batik menjadi tuan di negeri sendiri. Memang, sekarang ini batik China masuk ke Indonesia, tetapi produk ini pun merupakan jenis batik cap dan, baik motif maupun sapuan warnanya pun berbeda. Justru, perbedaan ini akan menjadi ciri khas produk batik Indonesia.

Pemberlakuan ACFTA memang dapat menjadi ancaman/tantangan bagi industri TPT domestik, tetapi sungguh ACFTA sendiri menimbulkan peluang. Dalam hal ini, industri TPT domestik yang berskala kecil dan menengah ini perlulah mendapat perhatian khusus agar industri ini tidak kedodoran dalam menghadapi perubahan eksternal dan dapat mempertahankan pasarnya sendiri. Artinya, batik sekarang ini dapat menjadi pusat dari revitalisasi industri TPT Indonesia di masa mendatang yang harus lebih berimprovisasi, baik dari sisi teknik maupun motif dan warna. Artinya, Batik Indonesia mulai sekarang dan seterusnya menjadi ikon kebanggaan nasional. Dengan demikian, industri TPT Indonesia bukanlah industri yang masuk kelas industri senja. Ia tetap menjadi industri sepanjang masa karena batik akan dipertahankan sepanjang masa, selama Republik ini mampu berdiri.

## Daftar Pustaka

### Buku dan Jurnal

- Anas, Titik. 1995. "Industri Manufaktur Indonesia: Perjalanan Lima Puluh Tahun". Dalam Bantarto Bandoro *et al.* (Ed.). *Refleksi Setengah Abad Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: CSIS.
- Asosiasi Pertekstilan Indonesia. "Indonesia Textile & Apparel Highlight". Diunduh dari [www.indonesiatextile.com](http://www.indonesiatextile.com), pada 26 Agustus 2010.
- Azis, Iwan Jaya. 1994 "Indonesia". Dalam John Williamson (Ed.). *The Political Economy of Policy Reform*. Washington, D.C.: Institute for International Economics.
- Basri, M. Chatib. 2005 "Habisnya Kuota TPT, Habisnya TPT Kita?" Dalam Hadi Soesastro (Ed.). *Pemikiran dan Permasalahan Ekonomi di Indonesia dalam Setengah Abad Terakhir*. Jakarta: ISEI-Kanisius.

- Bhagwati, Jagdish. 2004. *In Defense of Globalization*. Oxford: Oxford University Press.
- Chirathivat, Suthiphand. 2000. "ASEAN Economic Integration with the World through AFTA". Dalam Joseph L.H. Tan (Ed.). *AFTA in the Changing International Economy*. Singapura: ISEAS.
- Cookson, Michael B. 2008. *Batik Irian: Imprints of Indonesia Papua*. Canberra: Australian National University.
- Fabrizotti, Alberta. "The ASEAN Free Trade Area (AFTA) and Its Compatibility with GATT/WTO". *Asian Yearbook of International Law*, Vol. 8 (2003): 37–58.
- Freund, Caroline L. "Regionalism and Permanent Diversion". *International Finance Discussion Papers*, No. 602. Washington, DC: Board of Governors of the Federal Reserve System. Januari 1998.
- Gupta, Sayatan. "The Bangkok Agreement: Prospects for Trade Expansion in the Asia-Pacific Region," 25 Agustus 2009, hlm. 1–14, diunduh dari Social Science Research Network (SSRN) pada tanggal 10 Juli 2010; lihat <http://ssrn.com/abstract=1461374>.
- Lay Hong Tan., dan Samtani Anil. "The Sifting Paradigm in Regional Economic Integration: the ASEAN Perspective". 22 Agustus 2002, diunduh dari Social Science Research Network (SSRN) pada tanggal 10 Juli 2010, lihat <http://ssrn.com/abstract=325484> or doi:10.2139/ssrn.325484.
- Mackie, JAC. 2002. "Periode 1941–1965 sebagai Selingan dalam Pembentukan Ekonomi Nasional: Bagaimana Sebaiknya Kita Menafsirkan," dalam J. Thomas Lindblad (Ed.). *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM-Pustaka Pelajar.
- Manchin, Miriam, dan Annette O. Pelkmans-Balaoing. "Clothes without an Emperor: Analysis of the Preferential Tariffs in ASEAN". *Development Studies Working Papers Centro Studi Luca d'Agliano*, No. 223 (Januari 2007).
- M.D., Ilyaul Ulum. "Batik dan Kontribusinya terhadap Perekonomian Nasional." *Jurnal Bestari: Ejournal Universitas Muhammadiyah Malang*. Vol. 42 (2009): 21–32.
- Norberg, Johan. 2008. *Membela Kapitalisme Global*. Jakarta: Freedom Institute.
- Palmer, Ingrid., dan Lance Castle. 1971. "The Tekstil Industry". Dalam Bruce Glassburner (Ed.). *The Economy of Indonesia, Selected Reading*. New York: Cornell University Press.
- Palmer, Ingrid. 1972. *Textiles in Indonesia: Problem of Import Substitution*. New York: Praeger.
- Pengestu, Mari. 1995. "Sekilas Pandang Perekonomian Indonesia selama 50 Tahun Merdeka". Dalam Bantarto Bandoro et al. (Ed.). *Refleksi Setengah Abad Kemerdekaan Indonesia*. Jakarta: CSIS.
- Robles, Alfredo C., Jr. "The ASEAN Free Trade Area and the Construction of a Southeast Asian Economic Community in East Asia". *Asian Journal of Political Science*, Vol. 12/2 (Desember, 2004): 78–108.
- Soeri Suroto. "Sejarah Kerajinan di Indonesia". *Prisma No. 8* (Agustus, 1983).
- Stiglitz, Joseph E. 2003. *Globalisasi dan Kegagalan Lembaga-Lembaga Keuangan Internasional*. Jakarta: Ina Publikatama.
- Stiglitz, Joseph E. 2006. *Making Globalization Work*. London: Penguin Book.
- Sungkar, Yasmin. 2006. "ASEAN-China FTA: Komitmen dan Implikasi Ekonominya". Dalam Ratna S. Inayati (Ed.). *ASEAN-China FTA: Akselerasi Menuju East Asia Community (EAC)?* Jakarta: LIPI Press.
- Sutrisno, Benny. "Memacu Konsumsi dan Permintaan Produk TPT Indonesia di Pasar Domestik." Diunduh dari [www.indonesiatextile.com](http://www.indonesiatextile.com), pada 26 Agustus 2010.
- Sutter, John O. 1959. *Indonesianisasi Politics in a Changing Economy, 1940–1955, Vol. II: Sovereign Indonesia Strive for a National Economy*. New York: Cornell University.
- Tirta, Iwan. 1996. *Batik: A Play of Light and Shades*. Jakarta: Gaya Favorit Press.
- Widyastuti, Ratna S. 2002. "Tekstil: Industri Laruk Sanjo yang Harus Berjuang". Dalam Salomo Simanungkalit (Ed.). *Indonesia dalam Krisis 1997–2002*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Wing Thye Woo, Bruce Glassburner, dan Anwar Nasution. 1994. *Macroeconomic Policies, Crises, and Long-Term Growth in Indonesia, 1965–90*. Washington, D.C.: The World Bank.
- World Bank. 1999. *Indonesia from Crisis to Opportunity*. Washington, D.C.: The World Bank.
- World Bank. 1998. *Indonesia in Crisis: A Macroeconomic Update*. Washington, D.C.: The World Bank.
- Koran dan Internet  
 "ACFTA Ancam Industri Berbasis Pasar dalam Negeri", *Antara*, 7 Januari 2010.

“Produk China Banjiri Bandar Lampung”, *Antara*, 7 Januari 2010.

<http://aziz27.wordpress.com/2009/06/29/gabungan-koperasi-batik-indonesia/>, diunduh pada 26 Agustus 2010.

<http://bataviase.co.id/node/249568>, diunduh pada 13 Juni 2010.

<http://bola.kompas.com/read/xml/2010/06/20/15013315/Di.Afsel..Nama.Batik.Diubah>, diunduh pada 9 Juli 2010.

<http://egismy.wordpress.com/2008/04/18/bagian-ii-industri-tekstil-dan-produk-tekstil-tpt-indonesia/>, diunduh pada 8 Februari 2010.

<http://ekonomibisnis.suarasurabaya.net/?id=11854ed13f8f20790fe0864a4c40506201077607>, diunduh pada 12 Juni 2010.

[http://indonesiatextile.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=73&Itemid=50](http://indonesiatextile.com/index.php?option=com_content&task=view&id=73&Itemid=50), diunduh 29 Agustus 2010.

<http://nasional.kompas.com/read/2008/09/27/22170813/Batik.China.Diminati.Remaja.Semarang>, diunduh pada 31 Juli 2010.

[http://pesonabatik.site40.net/Sejarah\\_Batik.html](http://pesonabatik.site40.net/Sejarah_Batik.html), diunduh pada tanggal 09 Juli 2010.

[http://sekbertal.org/index.php?option=com\\_content&task=view&id=2368&Itemid=85](http://sekbertal.org/index.php?option=com_content&task=view&id=2368&Itemid=85), diunduh pada 13 Juni 2010.

[http://www.harian-global.com/index.php?option=com\\_content&view=article&id=3-7578:ekspansi-produk-china-memberi-tekanan-kepada-produk-lokal&catid=57:-gagasan-&Itemid=65](http://www.harian-global.com/index.php?option=com_content&view=article&id=3-7578:ekspansi-produk-china-memberi-tekanan-kepada-produk-lokal&catid=57:-gagasan-&Itemid=65), diunduh pada 4 Juni 2010.

[http://www.indonesia.go.id/en/index.php?option=com\\_content&task=view&id=8036&Itemid=701](http://www.indonesia.go.id/en/index.php?option=com_content&task=view&id=8036&Itemid=701), diunduh pada 9 Juli 2009.

[http://www.indotextiles.com/index.php?option=com\\_content&task=view&id=1095&Itemid=72](http://www.indotextiles.com/index.php?option=com_content&task=view&id=1095&Itemid=72), diunduh pada 9 Februari 2010.